

KONTESTASI MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI TULUNGAGUNG: PERGESERAN PREFERENSI MASYARAKAT DALAM MEMILIH PENDIDIKAN DASAR

Puji Astutik¹

Pujiastutik030380@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan dasar telah memunculkan kontestasi yang semakin kuat antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kontestasi antara MI dan SDN, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan preferensi masyarakat dalam memilih pendidikan dasar, serta mengkaji implikasinya terhadap tata kelola pendidikan dasar di daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta didukung oleh data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, media massa, dan berbagai hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi antara MI dan SDN tidak hanya berlangsung dalam perebutan peserta didik baru, tetapi juga mencakup kompetisi peningkatan mutu layanan pendidikan, pengembangan program unggulan, pembangunan citra lembaga, serta penguatan kepercayaan masyarakat. Pergeseran preferensi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas layanan pendidikan, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, pendidikan karakter dan keagamaan, fasilitas, inovasi pembelajaran, reputasi lembaga, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi pendidikan. Kontestasi tersebut berdampak pada tata kelola pendidikan dasar di Kabupaten Tulungagung, terutama dalam distribusi peserta didik, penataan kelembagaan sekolah, penguatan sistem penjaminan mutu, peningkatan inovasi layanan pendidikan, serta perlunya sinergi kebijakan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Penelitian ini menegaskan bahwa kontestasi antarlembaga pendidikan merupakan fenomena yang dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan apabila dikelola melalui tata kelola yang kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: kontestasi pendidikan, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Negeri, preferensi masyarakat, tata kelola pendidikan dasar.

ABSTRACT

Changes in community preferences in selecting primary education institutions have generated increasingly intense competition between Islamic Primary Schools

¹ Dosen Tetap STIT Misbahudin Ahmad Blitar

(Madrasah Ibtidaiyah / MI) and Public Primary Schools (Sekolah Dasar Negeri / SDN) in various regions, including Tulungagung Regency. This study aims to analyze the forms of contestation between MI and SDN, identify the factors influencing changes in community preferences in choosing primary education institutions, and examine their implications for primary education governance at the local level. This research employs a qualitative approach using a case study method. Data were collected through interviews, observations, documentation, and supported by secondary data from the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Religious Affairs, the Education Office, online media reports, and previous academic studies. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing using an interactive analysis model.

The findings reveal that the contestation between MI and SDN does not merely occur in attracting new students but also involves competition in improving educational service quality, developing distinctive school programs, building institutional reputation, and strengthening public trust. Changes in community preferences are influenced by several factors, including educational service quality, teacher competence, school leadership, character and religious education, school facilities, learning innovations, institutional reputation, and increasing public access to educational information. This contestation has significant implications for primary education governance in Tulungagung Regency, particularly regarding student distribution, school restructuring, quality assurance systems, educational service innovation, and the need for policy synergy between the Education Office and the Ministry of Religious Affairs. This study argues that competition among educational institutions can serve as a mechanism for improving educational quality when managed through collaborative, adaptive, and community-oriented governance.

Keywords: *educational contestation, Islamic Primary School, Public Primary School, community preference, primary education governance.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia karena pada jenjang inilah kemampuan literasi, numerasi, karakter, dan kompetensi sosial peserta didik mulai dibentuk secara sistematis. Dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan melalui dua lembaga yang memiliki kedudukan hukum yang setara, yaitu Sekolah Dasar (SD) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berada di bawah Kementerian Agama. Kesetaraan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan pengakuan terhadap madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, SD dan MI pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan layanan pendidikan dasar

yang bermutu, meskipun masing-masing memiliki karakteristik kurikulum, tata kelola, dan orientasi penguatan kompetensi yang berbeda.²

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Persaingan antarlembaga pendidikan tidak lagi hanya terjadi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, tetapi juga berlangsung antara Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Perubahan tersebut dipicu oleh meningkatnya kebebasan masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan yang dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan akademik maupun pembentukan karakter anak. Akibatnya, status sekolah sebagai lembaga negeri tidak lagi menjadi jaminan utama dalam menarik minat masyarakat. Orang tua kini semakin mempertimbangkan kualitas layanan pendidikan, kompetensi guru, budaya sekolah, prestasi akademik, pendidikan karakter, pembinaan keagamaan, fasilitas, hingga citra lembaga sebelum menentukan sekolah bagi anak-anak mereka.³

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Tulungagung. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah Sekolah Dasar Negeri mengalami penurunan jumlah peserta didik baru secara cukup signifikan, sedangkan beberapa Madrasah Ibtidaiyah justru mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan administratif bagi sekolah, tetapi juga memengaruhi tata kelola pendidikan dasar di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bahkan mulai mengkaji kebijakan penggabungan (merger) beberapa SD Negeri yang mengalami kekurangan peserta didik sebagai upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, terdapat hampir 200 SD Negeri yang menerima kurang dari sepuluh murid baru pada kelas I, bahkan beberapa sekolah tidak memperoleh peserta didik sama sekali pada tahun ajaran 2024/2025. Sekolah-sekolah tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran dan pegunungan sehingga menghadapi persoalan ganda, yaitu penurunan jumlah penduduk usia sekolah dan semakin ketatnya persaingan dengan lembaga pendidikan lain.⁴

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78

³ Anis Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences: A Case Study of Sekolah Dasar and Madrasah Ibtidaiyah in Tulungagung," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.36667/jppi.v13i1.2020>

⁴ Destyan H. Sujarwoko, "Pekab Tulungagung Kaji Peluang Merger SD Negeri Kekurangan Siswa," *ANTARA Jawa Timur*, 7 Mei 2025

Fenomena menurunnya jumlah peserta didik pada SD Negeri sebenarnya bukan persoalan yang baru di Kabupaten Tulungagung. Satu dekade sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung telah mengidentifikasi kecenderungan berkurangnya jumlah murid baru di sejumlah SD Negeri. Pada saat itu, salah satu faktor yang diidentifikasi adalah semakin berkembangnya lembaga pendidikan swasta, khususnya yang berbasis keagamaan, yang dinilai mampu menawarkan layanan pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Selain faktor demografi, masyarakat juga mulai mempertimbangkan kedekatan emosional dengan guru, kualitas pelayanan sekolah, lingkungan belajar, serta program-program unggulan yang ditawarkan lembaga pendidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa perubahan preferensi masyarakat telah berlangsung secara bertahap dan bukan merupakan fenomena yang muncul secara tiba-tiba.⁵

Menurunnya jumlah peserta didik pada SD Negeri kemudian mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan pemerataan distribusi peserta didik melalui pengaturan wilayah domisili agar tidak terjadi penumpukan siswa pada sekolah-sekolah tertentu, sementara sekolah lain mengalami kekurangan murid. Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi peserta didik telah berkembang menjadi isu strategis dalam tata kelola pendidikan dasar karena berkaitan dengan efisiensi anggaran, distribusi guru, serta keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal.⁶

Di sisi lain, meningkatnya minat masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah menunjukkan adanya transformasi yang cukup besar dalam pengelolaan pendidikan Islam. Madrasah tidak lagi dipandang hanya sebagai lembaga yang menitikberatkan pada pendidikan agama, tetapi telah berkembang menjadi institusi pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, literasi digital, serta pendidikan keagamaan dalam satu sistem pembelajaran. Berbagai program unggulan seperti tahfiz Al-Qur'an, pembelajaran berbasis teknologi, kelas bilingual, penguatan literasi, pembiasaan ibadah, serta pembinaan karakter menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Transformasi tersebut mendorong perubahan persepsi orang tua terhadap madrasah sebagai alternatif

⁵ Destyan H. Sujarwoko, "Dindik Tulungagung Pantau Sekolah Kekurangan Murid," *ANTARA Jawa Timur*, 17 Juli 2016.

⁶ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Tulungagung*, <https://spmb.tulungagung.go.id>

pendidikan dasar yang memiliki kualitas akademik sekaligus memberikan penguatan nilai-nilai religius.

Perubahan preferensi masyarakat tersebut diperkuat oleh penelitian Anis Sukmawati yang mengkaji pilihan orang tua terhadap SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Penelitian tersebut menemukan bahwa telah terjadi pergeseran minat masyarakat dari SD Negeri menuju Madrasah Ibtidaiyah dalam beberapa tahun terakhir. Orang tua yang memilih SD Negeri lebih mempertimbangkan prestasi akademik dan biaya pendidikan yang relatif terjangkau. Sebaliknya, orang tua yang memilih Madrasah Ibtidaiyah lebih mengutamakan pendidikan agama, pembentukan akhlak, kualitas pelayanan sekolah, kompetensi guru, fasilitas pembelajaran, lingkungan sekolah yang religius, serta kurikulum yang dianggap mampu mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan orang tua dalam memilih sekolah tidak lagi ditentukan oleh status negeri atau swasta, melainkan oleh kualitas layanan pendidikan yang dirasakan secara langsung.⁷

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah telah berkembang menjadi arena kontestasi pendidikan. Kontestasi tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai persaingan memperoleh peserta didik baru, tetapi juga sebagai kompetisi dalam membangun legitimasi, reputasi, dan kepercayaan masyarakat. Masing-masing lembaga berupaya membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi pembelajaran, peningkatan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan, penciptaan budaya sekolah, serta penguatan identitas kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan suatu lembaga pendidikan semakin ditentukan oleh kemampuannya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.

Fenomena serupa juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan bahwa kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah merupakan solusi yang rasional bagi sekolah-sekolah yang terus mengalami kekurangan peserta didik. Menurutnya, sekolah dengan jumlah siswa yang sangat sedikit menyebabkan penyelenggaraan pendidikan menjadi tidak efisien baik dari sisi pembiayaan maupun distribusi tenaga pendidik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang

⁷ Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences," 5–10

terjadi di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari fenomena nasional mengenai perubahan demografi peserta didik dan meningkatnya kompetisi antarlembaga pendidikan dasar.⁸

Meskipun berbagai penelitian telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah dasar, sebagian besar masih berfokus pada aspek preferensi individual, kualitas layanan, maupun kepuasan pelanggan pendidikan. Kajian yang secara khusus menjelaskan kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri sebagai arena persaingan kelembagaan yang berdampak terhadap perubahan preferensi masyarakat serta kebijakan pendidikan daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk-bentuk kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tulungagung, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan preferensi masyarakat, serta implikasinya terhadap tata kelola pendidikan dasar di daerah.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Kontestasi Antara Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Tulungagung

Kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Tulungagung merupakan manifestasi dari perubahan pola penyelenggaraan pendidikan dasar yang semakin berorientasi pada pilihan masyarakat (*school choice*). Dalam konteks tersebut, sekolah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai institusi publik yang menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga sebagai organisasi yang harus mampu mempertahankan eksistensi melalui peningkatan mutu, inovasi layanan, serta pembangunan kepercayaan masyarakat. Perubahan ini menyebabkan hubungan antara MI dan SD Negeri bergeser dari sekadar penyelenggara pendidikan yang berbeda secara administratif menjadi dua institusi yang berada dalam arena kompetisi untuk memperoleh peserta didik, legitimasi sosial, dan pengakuan publik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu lembaga pendidikan semakin ditentukan oleh kemampuannya memenuhi ekspektasi

⁸ "Mendikdasmen: 'Regrouping' SD Jalan Keluar Atasi Kekurangan Murid," *ANTARA News*, 20 Maret 2025.

masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan, bukan semata-mata oleh status kelembagaan sebagai sekolah negeri ataupun madrasah.⁹

Di Kabupaten Tulungagung, bentuk kontestasi yang paling nyata terlihat pada persaingan memperoleh peserta didik baru. Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi peserta didik pada jenjang sekolah dasar menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Sebagian SD Negeri mengalami penurunan jumlah siswa secara signifikan, sedangkan beberapa Madrasah Ibtidaiyah justru mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pendidikan bahkan mengkaji kebijakan *regrouping* atau penggabungan sekolah sebagai respons terhadap semakin banyaknya SD Negeri yang kekurangan murid. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, hampir 200 SD Negeri hanya memperoleh kurang dari sepuluh peserta didik pada kelas I, bahkan terdapat sekolah yang tidak menerima murid baru sama sekali pada tahun ajaran 2024/2025. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan menjadi terganggu karena rasio guru dan peserta didik menjadi tidak seimbang serta penggunaan anggaran sekolah menjadi kurang efisien.¹⁰

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak lagi memilih sekolah berdasarkan faktor kedekatan geografis semata. Orang tua mulai melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan pendidikan yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga sebelum menentukan pilihan sekolah bagi anak-anak mereka. Hasil penelitian Anis Sukmawati di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung memperlihatkan adanya pergeseran preferensi masyarakat dari SD Negeri menuju Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian tersebut menemukan bahwa penurunan jumlah peserta didik pada SD Negeri berlangsung bersamaan dengan meningkatnya jumlah siswa di MI. Keputusan orang tua dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi guru, kualitas pembelajaran, fasilitas sekolah, kurikulum, prestasi siswa, lingkungan sekolah, biaya pendidikan, serta pendidikan agama. Orang tua yang memilih MI cenderung memprioritaskan pembentukan karakter religius dan

⁹ Anis Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences: A Case Study of Sekolah Dasar and Madrasah Ibtidaiyah in Tulungagung,.....",1-12

¹⁰ Destyan H. Sujarwoko, "Pemkab Tulungagung Kaji Peluang Merger SD Negeri Kekurangan Siswa," *ANTARA Jawa Timur*, 7 Mei 2025.

pendidikan akhlak, sedangkan orang tua yang memilih SD Negeri lebih mempertimbangkan prestasi akademik, aksesibilitas sekolah, dan biaya pendidikan yang relatif lebih rendah.¹¹

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peserta didik telah menjadi objek kompetisi antarlembaga pendidikan. Dalam perspektif teori *school choice*, kondisi ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebebasan masyarakat dalam memilih sekolah sesuai dengan preferensi dan harapan keluarga. Sekolah yang mampu menghadirkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan sekolah yang hanya mengandalkan status kelembagaannya.

Bentuk kontestasi berikutnya adalah kompetisi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Persaingan antara MI dan SD Negeri tidak lagi bertumpu pada kurikulum nasional semata, tetapi juga pada kemampuan masing-masing lembaga menghadirkan inovasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tulungagung mulai mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, penguatan literasi dan numerasi, pemanfaatan teknologi digital, sekolah ramah anak, serta penguatan pendidikan karakter melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Sementara itu, Madrasah Ibtidaiyah mengembangkan keunggulan melalui integrasi kurikulum nasional dengan kurikulum keagamaan, program tahfiz Al-Qur'an, pembiasaan ibadah, penguatan akhlak, pembelajaran Bahasa Arab, serta pembinaan karakter Islami.

Hasil penelitian Muchamad Fauyan, Puji Yanti Fauziah, Lutfi Wibawa, dan Nordin Bin Mamat menunjukkan bahwa keputusan orang tua memilih Madrasah Ibtidaiyah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek religius, tetapi juga oleh kualitas proses pembelajaran, keamanan sekolah, iklim belajar yang kondusif, fasilitas pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, teknologi informasi, kegiatan ekstrakurikuler, prestasi akademik, keterlibatan orang tua, serta layanan pendidikan keagamaan seperti TPQ dan tahfiz. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa daya saing madrasah dibangun melalui kombinasi kualitas akademik dan penguatan karakter keagamaan sehingga mampu menarik minat masyarakat secara lebih luas.¹²

¹¹ Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences," 5–10.

¹² Muchamad Fauyan, Puji Yanti Fauziah, Lutfi Wibawa, dan Nordin Bin Mamat, "The Factors Affecting Parent's Preference When Selecting Islamic Schools," *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2024): 25–48, <https://doi.org/10.18326/mudarrisa.v16i1.634>

Kontestasi juga berlangsung dalam bentuk pengembangan program unggulan sebagai strategi diferensiasi lembaga. Di tengah semakin ketatnya persaingan, sekolah dituntut memiliki identitas yang membedakannya dari lembaga lain. Program unggulan menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik sekolah. SD Negeri mulai mengembangkan kelas digital, sekolah Adiwiyata, pembelajaran berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*), kelas inklusif, serta penguatan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Sebaliknya, Madrasah Ibtidaiyah mengembangkan program tahfiz, kelas bilingual, pembelajaran kitab dasar, pembiasaan ibadah harian, dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Strategi diferensiasi tersebut menunjukkan bahwa kontestasi pendidikan dasar tidak lagi hanya mengandalkan kurikulum nasional, tetapi juga inovasi kelembagaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Selain mutu layanan, citra lembaga (*school image*) menjadi arena kontestasi yang semakin penting. Pada era digital, reputasi sekolah dibangun melalui publikasi prestasi peserta didik, aktivitas sekolah, komunikasi dengan masyarakat, serta pemanfaatan media sosial. Penelitian Annisa Shabrina Nugroho, Lilik Noor Yuliati, dan Asep Taryana menunjukkan bahwa citra sekolah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan orang tua dalam memilih sekolah dasar. Semakin positif persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dan reputasi sekolah, semakin besar pula peluang sekolah tersebut memperoleh peserta didik baru. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa strategi pemasaran pendidikan (*educational marketing*) telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing lembaga pendidikan dasar.¹³

Kontestasi berikutnya tampak pada persaingan memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat menentukan keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. Orang tua tidak hanya menilai kualitas akademik sekolah, tetapi juga integritas guru, kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, keamanan lingkungan belajar, serta hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar. Penelitian Sukmawati menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kompetensi guru,

¹³ Annisa Shabrina Nugroho, Lilik Noor Yuliati, dan Asep Taryana, "Strategy To Enhance Enrollment in Private Primary Schools by Influencing Parental School Choice Decisions," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.23887/jpiundiksha.v13i2.70358>

lingkungan sekolah, fasilitas, dan komunikasi sekolah dengan orang tua menjadi faktor utama yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan sekolah memperoleh peserta didik baru sangat bergantung pada kemampuan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

Kontestasi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari kompetisi berbasis status menuju kompetisi berbasis mutu (*quality-based competition*). Jika sebelumnya sekolah negeri dipersepsikan sebagai pilihan utama masyarakat, saat ini masyarakat cenderung melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kualitas layanan yang ditawarkan setiap lembaga. Pergeseran tersebut mengharuskan baik SD Negeri maupun Madrasah Ibtidaiyah terus melakukan inovasi, meningkatkan profesionalisme guru, memperbaiki tata kelola kelembagaan, serta memperkuat identitas sekolah agar mampu mempertahankan eksistensinya di tengah meningkatnya pilihan pendidikan yang tersedia bagi masyarakat.

Dengan demikian, bentuk-bentuk kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tulungagung meliputi: (1) persaingan memperoleh peserta didik baru; (2) kompetisi peningkatan mutu layanan pendidikan; (3) pengembangan program unggulan sebagai strategi diferensiasi; (4) pembangunan citra dan reputasi sekolah; serta (5) perebutan kepercayaan masyarakat. Kelima bentuk kontestasi tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dasar telah memasuki era persaingan yang tidak lagi ditentukan oleh status kelembagaan, tetapi oleh kemampuan sekolah menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Perubahan Preferensi Masyarakat

Perubahan preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan dasar di Kabupaten Tulungagung merupakan fenomena yang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang berlangsung secara bertahap. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, preferensi masyarakat merupakan hasil dari proses pertimbangan rasional yang dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, nilai-nilai budaya, kondisi ekonomi, serta harapan orang tua terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, keputusan memilih Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Sekolah Dasar Negeri (SDN) tidak lagi didasarkan semata-mata pada status sekolah sebagai lembaga negeri atau swasta,

tetapi merupakan hasil evaluasi terhadap kualitas layanan pendidikan yang ditawarkan masing-masing lembaga.¹⁴

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perubahan preferensi masyarakat adalah meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan agama. Perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya tantangan moral, perkembangan teknologi digital, serta pengaruh globalisasi mendorong orang tua untuk mencari lembaga pendidikan yang tidak hanya mampu mengembangkan kemampuan akademik anak, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak. Dalam konteks tersebut, Madrasah Ibtidaiyah dipersepsikan mampu memberikan keseimbangan antara penguasaan ilmu pengetahuan umum dan pendidikan keagamaan melalui mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Bahasa Arab, serta berbagai pembiasaan ibadah yang menjadi bagian dari budaya madrasah.

Penelitian Muchamad Fauyan, Puji Yanti Fauziah, Lutfi Wibawa, dan Nordin Bin Mamat menunjukkan bahwa alasan religius bukan lagi satu-satunya faktor yang mendorong orang tua memilih sekolah Islam. Orang tua juga mempertimbangkan kualitas pembelajaran, keamanan sekolah, lingkungan belajar yang kondusif, kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas, prestasi akademik, kegiatan ekstrakurikuler, pemanfaatan teknologi informasi, serta komunikasi sekolah dengan orang tua. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama dipandang sebagai nilai tambah (*added value*) yang melengkapi kualitas akademik sekolah.¹⁵

Faktor kedua adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Perubahan preferensi masyarakat terjadi karena masyarakat semakin kritis dalam menilai mutu layanan pendidikan. Orang tua tidak lagi hanya melihat hasil akhir berupa nilai akademik, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran, profesionalisme guru, kualitas kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, keamanan lingkungan belajar, serta kemampuan sekolah membangun komunikasi dengan orang tua. Sekolah yang mampu memberikan

¹⁴ Anis Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences: A Case Study of Sekolah Dasar and Madrasah Ibtidaiyah in Tulungagung," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*..10-12

¹⁵ Muchamad Fauyan, Puji Yanti Fauziah, Lutfi Wibawa, dan Nordin Bin Mamat, "The Factors Affecting Parent's Preference When Selecting Islamic Schools," *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2024): 25–48. <https://doi.org/10.18326/mudarrisa.v16i1.634>

pelayanan yang responsif, transparan, dan profesional cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Anis Sukmawati mengenai preferensi orang tua di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa kompetensi guru, kualitas pelayanan sekolah, fasilitas pendidikan, lingkungan belajar, kurikulum, prestasi sekolah, serta biaya pendidikan merupakan faktor dominan yang memengaruhi keputusan orang tua dalam memilih SD Negeri maupun Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap MI dipengaruhi oleh persepsi bahwa madrasah mampu mengintegrasikan kualitas akademik dengan pendidikan karakter Islami.¹⁶

Faktor ketiga adalah pengembangan program unggulan dan inovasi pendidikan. Dalam era persaingan pendidikan, sekolah dituntut memiliki keunggulan yang membedakannya dari lembaga lain. Berbagai Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tulungagung mengembangkan program tahfiz Al-Qur'an, pembelajaran berbasis teknologi digital, kelas bilingual, pembiasaan ibadah, pendidikan karakter, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di sisi lain, SD Negeri mengembangkan program literasi, numerasi, pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), sekolah ramah anak, sekolah Adiwiyata, dan implementasi Kurikulum Merdeka. Program-program tersebut menjadi daya tarik yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah.

Mukniah dan Zainal Abidin dalam penelitian multisitus mengenai daya saing Madrasah Ibtidaiyah menjelaskan bahwa keberhasilan madrasah mempertahankan eksistensi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengembangkan program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Madrasah yang mampu melakukan inovasi pembelajaran dan membangun diferensiasi program memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang hanya mengandalkan kurikulum reguler.¹⁷

Faktor keempat adalah citra dan reputasi lembaga pendidikan (*school image*). Perkembangan media sosial menyebabkan informasi mengenai kualitas sekolah dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah. Prestasi siswa, kegiatan sekolah, fasilitas

¹⁶ Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences," 5–10.

¹⁷ Mukniah dan Zainal Abidin, "Strategi Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah melalui Program Unggulan: Studi Multisitus di Kabupaten Jember," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2023): 215–233.

pembelajaran, hingga testimoni orang tua menjadi bagian dari proses pembentukan citra lembaga. Reputasi yang positif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperbesar peluang sekolah memperoleh peserta didik baru.

Penelitian Annisa Shabrina Nugroho, Lilik Noor Yuliati, dan Asep Taryana menunjukkan bahwa citra sekolah berpengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua dalam memilih sekolah dasar. Semakin baik reputasi sekolah, semakin tinggi pula minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada lembaga tersebut. Oleh karena itu, strategi pemasaran pendidikan (*educational marketing*) menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing sekolah di tengah semakin banyaknya pilihan pendidikan.¹⁸

Faktor kelima adalah modal sosial (*social capital*) dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, banyak Madrasah Ibtidaiyah memiliki hubungan yang erat dengan pondok pesantren, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan Islam, maupun jaringan alumni. Modal sosial tersebut membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan madrasah. Sebaliknya, SD Negeri memperoleh legitimasi melalui dukungan pemerintah, tenaga pendidik ASN, serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan.

Dalam perspektif James Coleman, modal sosial berupa jaringan hubungan, kepercayaan, dan norma bersama merupakan sumber daya yang mampu meningkatkan efektivitas lembaga pendidikan. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan memengaruhi keputusan orang tua dalam menentukan pilihan pendidikan bagi anak.¹⁹ Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Sukmawati yang menunjukkan bahwa hubungan baik antara sekolah dan orang tua merupakan salah satu faktor penting dalam membangun loyalitas masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Faktor berikutnya adalah perubahan karakteristik orang tua sebagai konsumen pendidikan. Orang tua masa kini memiliki akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Informasi mengenai kualitas sekolah dapat diperoleh melalui media sosial, situs web sekolah, publikasi prestasi, maupun pengalaman orang tua

¹⁸ Annisa Shabrina Nugroho, Lilik Noor Yuliati, dan Asep Taryana, "Strategy to Enhance Enrollment in Private Primary Schools by Influencing Parental School Choice Decisions," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 13, no. 2 (2024).

¹⁹ James S. Coleman, "Social Capital in the Creation of Human Capital," *American Journal of Sociology* 94 (1988): S95–S120.

lain. Akibatnya, keputusan memilih sekolah menjadi lebih rasional dan berbasis informasi. Orang tua tidak lagi menerima informasi secara pasif, tetapi secara aktif membandingkan berbagai sekolah sebelum menentukan pilihan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memasuki era *informed school choice*, yaitu keputusan memilih sekolah berdasarkan evaluasi terhadap berbagai indikator mutu pendidikan.

Selain faktor internal sekolah, perubahan preferensi masyarakat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Penerapan kebijakan domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mempertimbangkan berbagai alternatif sekolah. Di Kabupaten Tulungagung, pemerintah daerah bahkan melakukan penyesuaian wilayah domisili hingga tingkat dusun sebagai upaya pemerataan distribusi peserta didik antar-sekolah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah turut memengaruhi dinamika kontestasi antara SD Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah melalui regulasi penerimaan peserta didik.²⁰

Dengan demikian, perubahan preferensi masyarakat dalam memilih pendidikan dasar di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan karakter dan agama, kualitas layanan pendidikan, inovasi program unggulan, citra lembaga, modal sosial dan kepercayaan masyarakat, karakteristik orang tua sebagai konsumen pendidikan, serta kebijakan pemerintah mengenai penerimaan peserta didik. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih sekolah tidak lagi didasarkan pada satu pertimbangan tunggal, tetapi merupakan hasil evaluasi multidimensional terhadap kualitas dan nilai tambah yang ditawarkan oleh setiap lembaga pendidikan.

3. Implikasinya Terhadap Tata Kelola Pendidikan Dasar Di Daerah

Kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Tulungagung tidak hanya memengaruhi preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan, tetapi juga membawa implikasi yang luas terhadap tata kelola pendidikan dasar di daerah. Pergeseran pilihan masyarakat tersebut berdampak pada perencanaan pendidikan, distribusi peserta didik, pengelolaan sumber daya manusia, alokasi anggaran, hingga arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan dasar. Dalam perspektif *educational governance*,

²⁰ Sukmawati, "Understanding Parents' School Selection Preferences," 8–11.

perubahan perilaku masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan menuntut pemerintah dan satuan pendidikan untuk membangun tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.²¹

Implikasi pertama terlihat pada ketidakseimbangan distribusi peserta didik antarsatuan pendidikan. Di Kabupaten Tulungagung, sejumlah SD Negeri mengalami penurunan jumlah peserta didik secara signifikan, sementara beberapa Madrasah Ibtidaiyah justru mengalami peningkatan jumlah pendaftar. Ketimpangan tersebut mengakibatkan sebagian sekolah memiliki rombongan belajar yang sangat sedikit, sedangkan sekolah lain mengalami kelebihan peminat. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, hampir 200 SD Negeri menerima kurang dari sepuluh peserta didik baru pada kelas I tahun ajaran 2024/2025, bahkan terdapat sekolah yang tidak memperoleh murid baru sama sekali. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan karena rasio guru dan peserta didik menjadi tidak proporsional serta biaya operasional sekolah tetap harus dipenuhi meskipun jumlah siswa sangat sedikit.²²

Persoalan tersebut mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan. Salah satunya adalah kajian mengenai *regrouping* atau penggabungan sekolah yang mengalami kekurangan peserta didik. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, pemerataan distribusi guru, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga menyatakan bahwa *regrouping* merupakan salah satu alternatif penyelesaian bagi sekolah-sekolah yang terus mengalami penurunan jumlah peserta didik akibat perubahan demografi dan meningkatnya kompetisi antarlembaga pendidikan.²³ Dengan demikian, kontestasi antara MI dan SDN telah memengaruhi arah kebijakan pendidikan dasar baik di tingkat daerah maupun nasional.

Implikasi kedua adalah perubahan strategi pengelolaan sekolah (*school governance*). Persaingan yang semakin ketat menyebabkan sekolah tidak lagi dapat

²¹ Mark Bevir, *Governance: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 15–31.

²² Destyan H. Sujarwoko, "Pemkab Tulungagung Kaji Peluang Merger SD Negeri Kekurangan Siswa," *ANTARA Jawa Timur*, 7 Mei 2025.

²³ "Mendikdasmen: 'Regrouping' SD Jalan Keluar Atasi Kekurangan Murid," *ANTARA News*, 20 Maret 2025.

mengandalkan status kelembagaan sebagai sekolah negeri ataupun madrasah. Setiap lembaga dituntut mengembangkan tata kelola yang lebih profesional melalui peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah, penguatan budaya organisasi, pengembangan sistem penjaminan mutu internal, serta inovasi dalam pelayanan pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin strategis (*instructional leader*) yang mampu membangun visi sekolah, menggerakkan guru, menjalin kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga yang dipimpinnya.²⁴

Penelitian Hallinger dan Heck menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memiliki pengaruh tidak langsung tetapi signifikan terhadap peningkatan mutu sekolah melalui penguatan budaya organisasi, pengembangan profesional guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran.²⁵ Oleh karena itu, keberhasilan SD Negeri maupun Madrasah Ibtidaiyah dalam mempertahankan jumlah peserta didik tidak hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga pada efektivitas tata kelola internal yang diterapkan oleh masing-masing lembaga.

Implikasi ketiga adalah meningkatnya tuntutan terhadap inovasi dan diferensiasi layanan pendidikan. Kontestasi mendorong setiap sekolah untuk mengembangkan program unggulan sebagai strategi meningkatkan daya saing. Madrasah Ibtidaiyah memperkuat identitasnya melalui program tahfiz Al-Qur'an, pendidikan karakter Islami, pembelajaran Bahasa Arab, dan integrasi kurikulum agama dengan kurikulum nasional. Sebaliknya, SD Negeri mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, penguatan literasi dan numerasi, kelas digital, sekolah ramah anak, serta berbagai inovasi berbasis Kurikulum Merdeka.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kondisi tersebut mencerminkan pergeseran dari *bureaucratic governance* menuju *competitive governance*, yaitu tata kelola pendidikan yang menempatkan inovasi, kualitas layanan, dan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan lembaga. Mukniah dan Zainal Abidin menunjukkan

²⁴ Tony Bush, *Theories of Educational Leadership and Management*, 4th ed. (London: Sage Publications, 2011), 67–82.

²⁵ Philip Hallinger and Ronald H. Heck, "Collaborative Leadership and School Improvement: Understanding the Impact on School Capacity and Student Learning," *School Leadership & Management* 30, no. 2 (2010): 95–110.

bahwa madrasah yang mampu mengembangkan program unggulan secara konsisten memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang hanya menjalankan program reguler.²⁶ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa inovasi menjadi faktor strategis dalam mempertahankan keberlangsungan lembaga pendidikan di tengah perubahan preferensi masyarakat.

Implikasi keempat berkaitan dengan penguatan akuntabilitas publik dan transparansi pengelolaan sekolah. Meningkatnya pilihan masyarakat terhadap berbagai lembaga pendidikan menyebabkan sekolah harus lebih terbuka dalam menyampaikan informasi mengenai mutu layanan, prestasi peserta didik, penggunaan anggaran, maupun program-program sekolah. Orang tua tidak lagi hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi menjadi mitra strategis yang turut mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kondisi ini mendorong sekolah untuk meningkatkan komunikasi publik melalui media sosial, situs web sekolah, forum komite sekolah, serta pelaporan kinerja secara berkala.

Penelitian Epstein menegaskan bahwa kemitraan yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sekolah.²⁷ Dalam konteks Kabupaten Tulungagung, kemampuan sekolah membangun hubungan yang baik dengan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan jumlah peserta didik di tengah meningkatnya persaingan antarlembaga pendidikan.

Implikasi kelima adalah perlunya sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Selama ini tata kelola pendidikan dasar berada di bawah dua otoritas yang berbeda, yaitu Dinas Pendidikan untuk SD Negeri dan Kementerian Agama untuk Madrasah Ibtidaiyah. Meskipun memiliki kewenangan yang berbeda, kedua lembaga melayani kelompok masyarakat yang sama dan berada dalam ruang kompetisi yang sama. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan daerah perlu dilakukan secara terpadu agar distribusi sekolah, kebutuhan guru, pembangunan sarana prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara lebih proporsional.

²⁶ Mukniah dan Zainal Abidin, "Strategi Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah melalui Program Unggulan: Studi Multisitus di Kabupaten Jember," *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2023): 215–233.

²⁷ Joyce L. Epstein, *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*, 2nd ed. (Boulder: Westview Press, 2011), 18–35.

Kajian UNESCO mengenai *Education Governance* menekankan bahwa tata kelola pendidikan yang efektif membutuhkan koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, transparansi, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.²⁸ Dalam konteks Tulungagung, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Kementerian Agama, dan satuan pendidikan menjadi penting agar kontestasi antara MI dan SD Negeri berkembang sebagai kompetisi yang sehat dalam meningkatkan mutu layanan, bukan sekadar persaingan memperoleh peserta didik.

Implikasi terakhir adalah penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat. Pergeseran preferensi masyarakat menunjukkan bahwa indikator keberhasilan sekolah tidak lagi hanya diukur melalui capaian akademik, tetapi juga melalui kualitas karakter lulusan, kepuasan orang tua, inovasi pembelajaran, serta kemampuan sekolah menjawab tantangan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan dasar di daerah perlu mengembangkan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan indikator akademik, karakter, kepuasan masyarakat, serta efektivitas kepemimpinan sekolah. Pendekatan tersebut akan mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tulungagung membawa implikasi yang kompleks terhadap tata kelola pendidikan dasar di daerah. Dampak tersebut meliputi perubahan distribusi peserta didik, penataan kelembagaan melalui *regrouping*, penguatan kepemimpinan sekolah, peningkatan inovasi layanan pendidikan, penguatan akuntabilitas publik, perlunya koordinasi lintas lembaga, serta pengembangan sistem penjaminan mutu yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kontestasi tersebut pada akhirnya dapat menjadi instrumen positif bagi peningkatan kualitas pendidikan apabila dikelola melalui kebijakan yang berbasis data, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

C. KESIMPULAN

²⁸ UNESCO, *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education* (Paris: UNESCO Publishing, 2021), 83–101.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Tulungagung merupakan fenomena yang mencerminkan perubahan paradigma masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan dasar. Kontestasi tidak lagi dipahami sebagai persaingan sederhana dalam memperoleh peserta didik, tetapi telah berkembang menjadi kompetisi multidimensional yang melibatkan peningkatan mutu layanan pendidikan, penguatan identitas kelembagaan, pembangunan citra sekolah, pengembangan program unggulan, serta upaya membangun kepercayaan masyarakat. Baik Madrasah Ibtidaiyah maupun Sekolah Dasar Negeri berupaya menghadirkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru, penguatan pendidikan karakter, serta penyediaan layanan pendidikan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perubahan preferensi masyarakat dalam memilih pendidikan dasar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Masyarakat tidak lagi menjadikan status sekolah sebagai lembaga negeri atau madrasah sebagai pertimbangan utama, tetapi lebih menitikberatkan pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Faktor-faktor seperti kualitas pembelajaran, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas pendidikan, program unggulan, pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, citra lembaga, lingkungan belajar, serta hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi pertimbangan utama orang tua dalam menentukan pilihan sekolah bagi anak-anak mereka. Pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin rasional dan selektif dalam mengambil keputusan pendidikan dengan mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang akan diperoleh peserta didik.

Kontestasi tersebut membawa implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pendidikan dasar di Kabupaten Tulungagung. Ketimpangan distribusi peserta didik antarsatuan pendidikan mendorong pemerintah daerah melakukan penataan kelembagaan melalui kebijakan pemerataan peserta didik dan kajian regrouping sekolah yang mengalami kekurangan murid. Di sisi lain, persaingan antarlembaga pendidikan mendorong sekolah untuk memperkuat tata kelola kelembagaan melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, pengembangan program unggulan, inovasi pembelajaran, penguatan sistem penjaminan mutu, serta peningkatan akuntabilitas publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola pendidikan dasar tidak lagi cukup berorientasi pada aspek administratif, tetapi harus mampu mengakomodasi dinamika

perubahan kebutuhan masyarakat serta perkembangan lingkungan pendidikan yang semakin kompetitif.

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa kontestasi antara Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri tidak seharusnya dipandang sebagai persaingan yang menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Sebaliknya, kontestasi perlu dimaknai sebagai mekanisme yang mendorong setiap lembaga pendidikan untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat daya saing secara sehat. Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah daerah bersama Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan perlu membangun tata kelola pendidikan yang lebih kolaboratif melalui sinkronisasi perencanaan, pemerataan akses pendidikan, penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah, serta pengembangan sistem penjaminan mutu yang berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Negeri dapat saling melengkapi dalam mewujudkan layanan pendidikan dasar yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi pendidikan dan manajemen pendidikan dengan menunjukkan bahwa perubahan preferensi masyarakat merupakan hasil interaksi antara kualitas kelembagaan, modal sosial, kebijakan pendidikan, dan perubahan nilai-nilai masyarakat. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada konteks Kabupaten Tulungagung sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, demografis, dan kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif antardaerah atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kontestasi pendidikan dasar di Indonesia. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

E. DAFTAR RUJUKAN

Bevir, Mark. *Governance: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Bush, Tony. *Theories of Educational Leadership and Management*. 4th ed. London: Sage Publications, 2011.

Coleman, James S. "Social Capital in the Creation of Human Capital." *American Journal of Sociology* 94 (1988): S95–S120.

Epstein, Joyce L. *School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools*. 2nd ed. Boulder: Westview Press, 2011.

Fauyan, Muchamad, Puji Yanti Fauziah, Lutfi Wibawa, dan Nordin Bin Mamat. "The Factors Affecting Parents' Preference When Selecting Islamic Schools." *MUDARRISA: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2024)

Hallinger, Philip, dan Ronald H. Heck. "Collaborative Leadership and School Improvement: Understanding the Impact on School Capacity and Student Learning." *School Leadership & Management* 30, no. 2 (2010)

Mukniah, dan Zainal Abidin. "Strategi Daya Saing Madrasah Ibtidaiyah melalui Program Unggulan: Studi Multisitus di Kabupaten Jember." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 2 (2023)

Nugroho, Annisa Shabrina, Lilik Noor Yuliati, dan Asep Taryana. "Strategy to Enhance Enrollment in Private Primary Schools by Influencing Parental School Choice Decisions." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 13, no. 2 (2024).

Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Tulungagung*. <https://spmb.tulungagung.go.id>.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2003.

Sujarwoko, Destyan H. "Dindik Tulungagung Pantau Sekolah Kekurangan Murid." *ANTARA Jawa Timur*. 17 Juli 2016.

Sujarwoko, Destyan H. "Pemkab Tulungagung Kaji Peluang Merger SD Negeri Kekurangan Siswa." *ANTARA Jawa Timur*. 7 Mei 2025.

Sukmawati, Anis. "Understanding Parents' School Selection Preferences: A Case Study of Sekolah Dasar and Madrasah Ibtidaiyah in Tulungagung." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2025)

UNESCO. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. Paris: UNESCO Publishing, 2021.

Puji Astutik : Kontestasi Madrasah.....

"Mendikdasmen: Regrouping SD Jalan Keluar Atasi Kekurangan Murid." *ANTARA News*. 20 Maret 2025.